

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Keluarga Berencana

NAMA INDIKATOR

Rasio PKB/PLKB Dengan Desa/Kelurahan (Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

TAHUN

2017

KONSEP

- Rasio PKB/PLKB dengan Desa/Kelurahan adalah perbandingan antara PKB/PLKB dengan desa/kelurahan
- Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Swasta Sipil dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program KKBPK.
- Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluhan KKBPK, adalah kegiatan penyampaian informasi tentang program KKBPK dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
- Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Swasta Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/Kelurahan.

RUJUKAN

- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan S Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (Pusdiklat Pemda)

RUMUS

Jumlah PLKB : jumlah Desa/Kelurahan

Teknik penghitungan

- Jumlah PLKB : jumlah Desa/Kelurahan = perbandingan jumlah PLKB untuk penyampaian penyuluhan keluarga berencana dengan jumlah desa/kelurahan
- Jumlah PLKB = banyaknya Petugas Lapangan Penyuluhan Keluarga Berencana
- Jumlah Desa/Kelurahan = banyaknya desa/kelurahan di Indonesia

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Rasio

UNIT

Kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga b

KEGUNAAN

Untuk mengukur rasio atau perbandingan PKB/PLKB dengan desa/kelurahan untuk gambaran berhasilnya program KB

INTERPRETASI

Diperkirakan kebutuhan Petugas Lapangan KB di Indonesia sekitar 50% dari jumlah desa dan kelurahan. Asumsinya setiap dua (2) desa 1 (satu) Petugas . Misal : Rasio atau perbandingan PKB/PLKB dengan Desa/Kelurahan adalah 1: 2, artinya jika jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah 100 desa/kelurahan maka jumlah PLKB di wilayah tersebut ada 50 orang.

KETERANGAN

• Sasaran Penyuluhan Keluarga Berencana :

- | | |
|--|---|
| 1) Data KB yang terdiri dari pasangan kontrasepsi yang dipakai dan tempat data bukan peserta KB | usia subur, peserta KB berdasarkan pelayanan (pemerintah dan swasta), |
| 2) Data kependudukan, yang terdiri dari kelamin, status perkawinan, jumlah penduduk per kelompok umur, jumlah kelahiran dan kematian | umur berdasarkan kelompok, jenis jiwa dalam keluarga, jumlah |
| 3) Data keluarga sejahtera, yang terdiri sejahtera tahap I, sejahtera tahap II, tahap III plus | dari jumlah keluarga pra sejahtera, sejahtera tahap III dan sejahtera |
| 4) Data potensi, gedung atau bangunan kegiatan KB dan KS, tokoh formal dan kegiatan KB dan bisa diajak untuk bermitra | yang dapat dimanfaatkan dalam tokoh informal yang mendukung |
| 5) Data geografi terdiri sarana garapan | penghubung, letak geografis wilayah |
| 6) Data sosial budaya masyarakat, terdiri keagamaan, pertemua-pertemuan dan program Kependudukan dan KB. | dari adat istiadat dan tadisi, factor pendukung serta penghambat |

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DOKUMEN

LKPJ,LPPD

